



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 121.04/Kep.DPRD-04/2020

TENTANG

REKOMENDASI ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
GUBERNUR JAWA BARAT AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

- Menimbang : a. bahwa Panitia Khusus III telah melakukan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa hasil pembahasan sebagaimana dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Barat;

Memperhatikan : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 20 Mei 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Laporan Panitia Khusus III berupa Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berupa catatan strategis guna perbaikan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat kedepan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Bandung
pada tanggal 20 Mei 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
Ketua,

ttd

TAUFIK HIDAYAT

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT.
NOMOR : 121.04/Kep.DPRD-04/2020
TANGGAL : 20 Mei 2020.
TENTANG : REKOMENDASI ATAS LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR JAWA BARAT
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019.

CATATAN STRATEGIS

DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH SEJALAN DENGAN UPAYA MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, BERTANGGUNG JAWAB, SERTA MAMPU MENJAWAB TUNTUTAN PERUBAHAN SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN SESUAI DENGAN PRINSIP TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, MAKA KEPALA DAERAH WAJIB MELAPORKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, DALAM BENTUK LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ).

DALAM KONTEKS INILAH DPRD YANG MEMILIKI FUNGSI PENGAWASAN SUDAH SEHARUSNYA MEMAKSIMALKAN PERANNYA DALAM MENGAWASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN. DENGAN EFEKTIFNYA PENGAWASAN DIHARAPKAN KINERJA APARAT PEMERINTAH DAERAH AKAN LEBIH MENINGKAT, YANG AKHIRNYA BERMUARA PADA PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DAN PERCEPATAN PENCAPAIAN TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DENGAN MEMBERIKAN REKOMENDASI YANG LEBIH KONSTRUKTIF.

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PASAL 18 AYAT (2) LKPJ DISUSUN BERDASARKAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DITETAPKAN DALAM DOKUMEN PERENCANAAN DAN ANGGARAN TAHUNAN. DISAMPING ITU, OUTPUT DARI LKPJ ADALAH KEPUTUSAN DPRD YANG DISAMPAIKAN KEPADA KEPALA DAERAH YANG MEMUAT REKOMENDASI BERUPA CATATAN-CATATAN STRATEGIS YANG BERISIKAN SARAN, MASUKAN, DAN KOREKSI UNTUK PERBAIKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KE DEPAN.

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) GUBERNUR JAWA BARAT AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 MERUPAKAN DOKUMEN YANG HARUS DIPENUHI OLEH GUBERNUR SEBAGAIMANA DIAMANATKAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.

SEHUBUNGAN HAL TERSEBUT, MAKA GUBERNUR TELAH MENYAMPAIKAN NOTA PENGANTAR PERIHAL LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) GUBERNUR JAWA BARAT AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 PADA PARIPURNA TANGGAL 20 APRIL 2020 DAN LANGSUNG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS III DPRD PROVINSI JAWA BARAT UNTUK MEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) GUBERNUR JAWA BARAT AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 YANG MULAI MELAKSANAKAN TUGASNYA SEJAK TANGGAL 24 APRIL SAMPAI DENGAN 20 MEI 2020.

BERIKUT KAMI SAMPAIKAN POKOK-POKOK HASIL PEMBAHASAN, SEBAGAI RINGKASAN DARI LAPORAN PANITIA KHUSUS III.

KAMI SAMPAIKAN APRESIASI KEPADA JAJARAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT ATAS SELURUH CAPAIAN PEMBANGUNAN TAHUN 2019. ADA BEBERAPA CAPAIAN INDIKATOR PEMBANGUNAN YANG KITA BACA, ANTARA LAIN

KENAIKAN ANGKA STATISTIK CAPAIAN IPM TAHUN 2019 DI 72,03 POIN DIBANDING TAHUN 2018, YANG ANGKA INI MENUNJUKKAN ANGKA HARAPAN HIDUP, LAMA SEKOLAH, MELEK HURUF, DAN KEMAMPUAN EKONOMI MASYARAKAT JAWA BARAT. TENTU SAJA CAPAIAN ANGKA INI HARUS BISA KITA BUKTIKAN DENGAN KONDISI FAKTUAL DI LAPANGAN. KITA PUN PERLU MEMPERHATIKAN VARIABLE LAIN MISALNYA ANGKA PENGANGGURAN, PEMERATAAN PEMBANGUNAN KOTA DAN DESA, DAN SEKTOR PENDUKUNG LAIN, JIKA DIBANDINGKAN DENGAN RESOURCES YANG KITA MILIKI, TERMASUK KEKAYAAN SUMBER DAYA ALAM. DEMIKIAN JUGA DENGAN CAPAIAN INDEKS INDIKATOR TIAP MISI YANG TERLIHAT KURANG MERATA. BEBERAPA INDEKS INDIKATOR KITA SEBAGAI PROVINSI JABAR JUARA TERNYATA MASIH BERADA DI BAWAH PROVINSI JAWA TENGAH DAN JAWA TIMUR.

POSTUR APBD TAHUN 2019 MENUNJUKKAN KEMAMPUAN SERAPAN PEMERINTAHAN PROVINSI YAKNI HANYA 91,62% DENGAN REALISASI BELANJA 35,83 T. REALISASI BELANJA INI TERLIHAT MENURUN DIBANDING CAPAIAN BELANJA TAHUN 2018 YAKNI 94,47%, INI MENUNJUKKAN ADANYA TREND PERTUMBUHAN YANG MELAMBAT. DI BEBERAPA SEKTOR, TERLIHAT MASIH RENDAHNYA ALOKASI ANGGARAN BUAT BELANJA LANGSUNG DIBANDING BELANJA TIDAK LANGSUNG. HAL INI MENUNJUKKAN KOMITMEN DAN KEBERPIHAKAN PEMERINTAH PROVINSI TERHADAP SEKTOR RIIL YANG DIBUTUHKAN MASYARAKAT. KAMI TERUS MENDORONG JAJARAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT UNTUK MENINGKATKAN KINERJANYA AGAR MAMPU MEREALISASIKAN PROGRAM DAN KEGIATAN DENGAN BAIK DAN TEPAT SASARAN AGAR DAYA SERAP ANGGARAN BISA LEBIH TINGGI. PERLU DITINGKATKAN KECERMATAN PERENCANAAN, KEMAMPUAN MENGEKSEKUSI PROGRAM DAN KEGIATAN, KOORDINASI ANTAR PERANGKAT DAERAH, TERMASUK MELIHAT FAKTOR-FAKTOR LAIN YANG MUNGKIN DAPAT MEMPENGARUHI CAPAIAN TARGET.

PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2019 MENCAPAI RP 36,03 TRILIUN (99,75% DARI TARGET RP 36,12 TRILIUN). SATU HAL YANG PERLU KITA CERMATI ADALAH, SELAIN TAK TERCAPAINYA TARGET, CAPAIAN PERTUMBUHAN PAD YANG TAHUN 2019 ADALAH TERKECIL DIBANDING PERTUMBUHAN SETIDAKNYA DI 3 TAHUN TERAKHIR. DEMIKIAN JUGA DARI POS PENDAPATAN LAIN-LAIN, DAN REALISASI KOMPONEN PENDAPATAN YANG LAIN. UNTUK ITU SUDAH SELAYAKNYA SDR. GUBERNUR MELAKUKAN EVALUASI YANG CERMAT AGAR TREND PELAMBATAN PERTUMBUHAN PANDAPATAN INI DAPAT DI ATASI. SECARA UMUM KAMI MELIHAT MISALNYA BELUM OPTIMALNYA PENGELOLAAN POTENSI SEKTOR PARIWISATA DAN BUMD. BEBERAPA PROGRAM BELUM BERJALAN DENGAN BAIK DISANA, PADAHAL SEKTOR INI BERPOTENSI BESAR MENINGKATKAN LAJU PERTUMBUHAN PAD. PENGAWASAN TERHADAP PRODUKTIVITAS BUMD PUN MASIH PERLU PENGUATAN, TERMASUK KEBERANIAN MELAKUKAN EVALUASI PENCAPAIAN TARGET, AGAR BUMD DAPAT MEMBERIKAN KONTRIBUSI YANG OPTIMAL UNTUK DAERAH. BEBERAPA BUMD TERLIHAT MENGALAMI PENURUNAN DALAM KONTRIBUSI LABA UNTUK DAERAH. KEBERPIHAKAN ANGGARAN DAN KEBIJAKAN JUGA PERLU DITINGKATKAN PADA SEKTOR EKONOMI MASYARAKAT YANG TERASA LANGSUNG MENINGKATKAN EKONOMINYA, TERMASUK DALAM HAL KETAHANAN PANGAN. MISALNYA PADA SEKTOR PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN, TERMASUK UMKM.

KAMI SAMPAIKAN CATATAN STRATEGIS BERDASARKAN BIDANG, SEBAGAI BERIKUT:

A. BIDANG PEMERINTAHAN.

1. PERMASALAHAN YANG TERJADI DI BIRO ORGANISASI, ANTARA LAIN ADANYA PERUBAHAN REGULASI TENTANG KELEMBAGAAN YANG BERAKIBAT KEPADA PENYESUAIAN SECARA CEPAT KEPADA STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN TUGAS POKOK SERTA FUNGSI DAN BELUM SEMUA PERANGKAT DAERAH MENETAPKAN STANDAR PELAYANAN YANG DIAMANATKAN OLEH UU NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK.
2. TERDAPAT BEBERAPA HAMBATAN DALAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI JAWA BARAT, DIANTARANYA KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA DI KAB/KOTA UNTUK PERCEPATAN PELAYANAN ADMINDUK KEPADA MASYARAKAT, KESULITAN KETERSEDIAAN SDM APARATUR DI KAB/KOTA YANG KOMPETEN SERTA KONEKTIVITAS JARINGAN KOMUNIKASI DATA YANG KURANG STABIL.
3. INDIKATOR DAN KRITERIA PENCAPAIAN PROGRAM UNGGULAN DESA JUARA, YANG MERUPAKAN PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2019 YANG MENCAKUP BIDANG INFRASTRUKTUR DENGAN PROGRAM GERBANG DESA, BIDANG EKONOMI DENGAN PROGRAM ONE VILLAGE ONE COMPANY, DAN BIDANG DIGITAL DENGAN PROGRAM DESA DIGITAL BELUM BERDAMPAK SIGNIFIKAN.
4. MASIH TERDAPAT REALISASI ANGGARAN DIBAWAH 70% YANG DISEBABKAN ADANYA PERMASALAHAN SELAIN ANGGARAN YANG BERSIFAT PENYEDIAAN SEPERTI BIMTEK DAN MEDICAL CHECK-UP JUGA DISEBABKAN OLEH KETERBATASAN WAKTU PADA SAAT PROSES PERUBAHAN APBD SERTA PADATNYA AGENDA DPRD, DIANTARANYA KEGIATAN RESES, KEGIATAN ORIENTASI BAGI DPRD DAN PELANTIKAN DPRD YANG DILAKSANAKAN PADA BULAN SEPTEMBER 2019 YANG BERDAMPAK PADA PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN (AKD), SEHINGGA REALISASI ANGGARAN TIDAK TERSERAP OPTIMAL.
5. PELAKSANAAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH MENGALAMI KETERLAMBATAN, MENYEBABKAN TIDAK TERSERAPNYA ANGGARAN.
6. PARTISIPASI POLITIK DI JAWA BARAT DALAM PEMILU KEPALA DAERAH MENGALAMI KENAIKAN MENCAPAI 82,30%.
7. INDEKS KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN TAHUN 2019 MENCAPAI 82,50% YANG DIHITUNG BERDASARKAN RAIHAN ASPEK BERKURANGNYA PELANGGARAN PERDA PERKADA, BERKURANGNYA GANGGUAN TRIBUMTRANSNAS DAN MENINGKATNYA PERLINDUNGAN MASYARAKAT.
8. KUALIFIKASI INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI JAWA BARAT MENCAPAI TARGET YAITU INFORMATIF. SEDANGKAN TINGKAT KEPUASAN TERHADAP LAYANAN KEPROTOKOLAN BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TERKUALIFIKASI BAIK.
9. IMPLEMENTASI JABAR QUICK RESPONSE (JQR) YANG MERUPAKAN PROGRAM PRIORITAS YANG BERTUJUAN MEMPERCEPAT PENANGANAN MASALAH SOSIAL DAN KEMANUSIAAN PADA MASYARAKAT JAWA BARAT, TERUTAMA YANG BERSIFAT DARURAT, MASIH BELUM DIRASAKAN MANFAATNYA.

B. PEREKONOMIAN

1. POS BELANJA LANGSUNG YANG MENCERMINKAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT BAGI KEPENTINGAN RAKYAT JAWA BARAT KHUSUSNYA DI MITRA KERJA KOMISI II DPRD PROVINSI JAWA BARAT SEBAGAI PROGRAM PENDORONG PEREKONOMIAN BELUM MENUNJUKKAN

KEBERPIHAKAN DAN PRIORITAS YANG MEMADAI. JUMLAH BELANJA LANGSUNG SELURUH MITRA KOMISI II ADALAH RP.790.814.703.476,-. ATAU HANYA 2% DARI TOTAL APBD TAHUN 2019. BAHKAN JUGA HANYA SEBESAR 8% BILA DIBANDINGKAN DENGAN BELANJA LANGSUNG APBD TAHUN 2019.

2. EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH LEBIH BANYAK BERKUTAT PADA LEVEL PRODUKTIFITAS SEKTORAL SECARA UMUM DI JAWA BARAT, TIDAK MENGUKUR TARAF KESEJAHTERAAN DARI PARA PELAKU USAHANYA, MISALNYA KESEJAHTERAAN PETANI, PETERNAK, NELAYAN, PEMBUDIDAYA IKAN DAN UMKM DI JAWA BARAT. BAHKAN ANGKA PARAMETER YANG DIGUNAKAN ADALAH ANGKA KELUARAN BPS YANG SEHINGGA TIDAK MENCERMINKAN KINERJA PROGRAM YANG SESUNGGUHNYA, KARENA MERUPAKAN HASIL AKUMULASI KINERJA BERBAGAI PIHAK SEPERTI PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA, SEKTOR DUNIA USAHA SENDIRI DAN UPAYA RAKYAT SENDIRI. SEDANGKAN KINERJA PROGRAM SENDIRI SERINGKALI TIDAK DIUKUR SECARA OBYEKTIF DAN AKURAT, SEHINGGA SELALU ADA PENGULANGAN PROGRAM YANG SAMA SETIAP TAHUN TANPA ADA EVALUASI YANG MENDETIL TERHADAP EFEKTIFITAS DAN MANFAAT PROGRAM TERSEBUT BAGI RAKYAT JAWA BARAT.
3. MASIH BANYAK KEGIATAN-KEGIATAN YANG HANYA MENGANGGARKAN DANA TERLALU KECIL UNTUK URUSAN PROVINSI, SEHINGGA TERKESAN HANYA BAGI-BAGI ANGGARAN SAJA KE SELURUH PERANGKAT DAERAH YANG ADA. HAL INI BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP EFESIENSI DAN *MONEY FOLLOW PROGRAM*. SECARA KHUSUS PEMBAHASAN SETIAP MITRA KERJA KOMISI II DPRD PROVINSI JAWA BARAT MELIPUTI :

A. DINAS TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA PROVINSI JAWA BARAT

SECARA UMUM KINERJA DINAS TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA DALAM MENCAPI TARGET NILAI TUKAR PETANI (NTP) SANGAT TIDAK MEMUASKAN, KARENA TIDAK MENCAPI TARGET YANG DIHARAPKAN, APALAGI BERBICARA KESEJAHTERAAN PETANI DI JAWA BARAT. DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA JUGA TIDAK MELAPORKAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA ALOKASI KHUSUS DARI PEMERINTAH PUSAT UNTUK APBD 2019, DIBANDINGKAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA JUMLAHNYA JAUH LEBIH BESAR DARI APBD SENDIRI. HAL INI MENUNJUKKAN KETIDAKTRANSPARANAN DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA.

B. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT

KETAHANAN PANGAN DAN SEKTOR PETERNAKAN SEHARUSNYA BISA MENJADI SALAH SATU KEUNGGULAN JAWA BARAT KARENA JAWA BARAT MEMILIKI BANYAK SUMBER DAYA MANUSIA YANG TERBAIK DI SEKTOR PETERNAKAN DAN PANGAN, KHUSUSNYA YANG BERASAL DARI PERGURUAN TINGGI DI JAWA BARAT SERTA PARA PELAKU PETERNAKAN YANG SUDAH SEJAK LAMA MENJADI PENYUMBANG TERBESAR PRODUK PETERNAKAN BAGI INDONESIA.

DI JAWA BARAT SAMPAI TAHUN 2019 BELUM ADA RENCANA TAHAPAN UNTUK PEMBANGUNAN SEKTOR PETERNAKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL, MISALNYA UNTUK MENINGKATKAN PRODUKSI SUSU SAPI, DAGING SAPI, TELUR, DAN AYAM LOKAL.

DATA PETERNAKAN JAWA BARAT SAMPAI TAHUN 2019 BELUM BISA MEMBERIKAN AKURASI JUMLAH HEWAN TERNAK YANG ADA DI JAWA BARAT BESERTA LOKASI DIMANA PETERNAKANNYA BERADA. HAL INI PENTING UNTUK MENYUSUN STRATEGI, KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENINGKATAN SEKTOR PETERNAKAN.

C. DINAS KELAUTAN & PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT

POTENSI BUDIDAYA AIR LAUT JAWA BARAT CUKUP BESAR, BAHKAN KHUSUSNYA UNTUK LOBSTER ADALAH YANG TERBESAR DI INDONESIA BAHKAN DUNIA. KAWASAN PERAIRAN SELATAN SUKABUMI ADALAH PUSAT BERKEMBANGBIAKNYA LOBSTER LAUT YANG BANYAK DIJADIKAN SUMBER BENIH DI BERBAGAI TEMPAT DI DUNIA.

PROGRAM-PROGRAM YANG ADA DI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN JAWA BARAT PADA TAHUN 2019 SUDAH MULAI MELIRIK BUDIDAYA PERIKANAN LAUT, NAMUN JUMLAHNYA MASIH SANGAT TIDAK SIGNIFIKAN. PADAHAL POTENSI BUDIDAYA PERIKANAN LAUT JAWA BARAT SANGATLAH BESAR.

SAMPAI TAHUN 2019 IMPLEMENTASI PERDA PEDOMAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN BELUM BERJALAN SESUAI HARAPAN, DEMIKIAN PULA UNTUK IMPLEMENTASI PERDA PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN, PEMBUDIDAYA IKAN DAN PETAMBAK GARAM YANG MASIH BELUM DISUSUN PERATURAN GUBERNUR TERKAIT HAL TERSEBUT.

D. DINAS PARIWISATA & KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA BARAT

APABILA PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT INGIN MENJADIKAN SEKTOR PARIWISATA SEBAGAI SALAH SATU PRIORITAS DAN SEKTOR UNGGULAN, MAKA PEMBANGUNAN SEKTOR PARIWISATA HARUS DIMULAI DARI PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIANYA. PADA TAHUN 2019 HAL INI BELUM TERCERMIN DALAM PROGRAM-PROGRAM YANG ADA, MASIH SANGAT MINIM PROGRAM KEGIATAN YANG MEMPERSIAPKAN MANUSIA JAWA BARAT SEBAGAI AKTOR UTAMA SEKTOR PARIWISATA KE DEPAN NANTI, JUSTRU PROGRAM YANG ADA HANYA FOKUS PADA PEMBANGUNAN OBYEK WISATA YANG BELUM TENTU JUGA MENJADI DAYA TARIK BAGI WISATAWAN NUSANTARA MAUPUN MANCANEGARA, KARENA TIDAK DIBANGUN BERDASARKAN HASIL PENELITIAN, TERUTAMA PENELITIAN PASAR.

DI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN PADA TAHUN 2019 TERDAPAT ANGGARAN SEBESAR 1,9 MILYAR UNTUK PENYUSUNAN PERUBAHAN PERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN, NAMUN HASILNYA TIDAK ADA DAN TIDAK DIUSULKAN MENJADI BAGIAN DARI PROPEMPERDA. HAL INI MENUNJUKAN BAHWA PROGRAM TERSEBUT TIDAK DITINDAKLANJUTI WALAUPUN ANGGARAN SUDAH BERJALAN.

E. DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA BARAT

KHUSUSNYA PERLU ADA EVALUASI DAN AUDIT TERHADAP PROGRAM JUTAAN BIBIT KOPI YANG TELAH DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH JAWA BARAT, KARENA PADA KENYATAANNYA TIDAK TERDAPAT PERTUMBUHAN YANG SIGNIFIKAN DI SISI HULU TERHADAP PRODUKSI KOPI JAWA BARAT.

SELAIN JUGA MINIMNYA UPAYA PENINGKATAN BRANDING KOMODITAS JAWA BARAT OLEH PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT, TERUTAMA UNTUK MENEMBUS PASAR EKSPOR. SEHINGGA DENGAN SEGALA POTENSI PERKEBUNAN YANG SUDAH ADA RATUSAN LALU SEJAK JAMAN PEMERINTAH KOLONIAL BELANJA, JAWA BARAT MASIH BELUM DIKENAL SEBAGAI PENGHASIL KOMODITAS TERBANYAK DAN TERBAIK. YANG ADA BAHKAN LAHAN PERKEBUNAN DI JAWA BARAT SEMAKIN MENYUSUT DAN BERALIH FUNGSI MENJADI PERUNTUKKAN LAIN.

F. DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA BARAT

KHUSUS DINAS KEHUTANAN, BAHKAN BELANJA TIDAK LANGSUNG JAUH LEBIH BESAR DIBANDINGKAN BELANJA LANGSUNGNYA. YANG APABILA DIKAJI LEBIH JAUH HAL INI TERJADI KARENA SANGAT BESARNYA JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA YANG ADA DI DINAS KEHUTANAN, KARENA PRAKTIS SEMUA URUSAN KEHUTANAN SEKARANG TELAH MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI SEHINGGA PERLU ADA PENINGKATAN JUMLAH ANGGARAN YANG SIGNIFIKAN UNTUK MEMPEROLEH TINGKAT PRODUKTIFITAS YANG LEBIH BAIK.

G. DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL (KUK) PROVINSI JAWA BARAT

PADA TAHUN 2019 INI DINAS KUK SANGAT RENDAH SERAPAN ANGGARANNYA RELATIF DIBANDINGKAN DINAS LAIN MITRA KOMISI II LAINNYA. KHUSUSNYA KINERJA PADA PROGRAM ONE PESANTREN ONE PRODUK YANG MEMPEROLEH ALOKASI ANGGARAN PALING BESAR NAMUN TIDAK BERHASIL DISERAP SECARA KESELURUHAN. PROGRAM INIPUN SECARA TEKNIS TIDAK MENDORONG PENINGKATAN KUALITAS DAN KESEJAHTERAAN PESANTREN KARENA JUMLAH DANA YANG DIBERIKAN KEPADA MASING – MASING PESANTREN SANGAT KECIL DALAM BENTUK HADIAH PERLOMBAAN.

DINAS KUK TIDAK KOMPETEN UNTUK MENGELOLA PROGRAM YANG TERKAIT DENGAN PESANTREN KARENA JUGA BUKAN MERUPAKAN TUPOKSI DINAS TERSEBUT.

H. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA BARAT

PADA TAHUN 2019 TERJADI RELOKASI INDUSTRI DALAM JUMLAH BESAR DARI JAWA BARAT KELUAR JAWA BARAT YANG BERPANGKAP TERHADAP PENURUNAN PERTUMBUHAN INDUSTRI MANUFAKTUR DAN PENINGKATAN JUMLAH PENGANGGURAN, NAMUN TIDAK ADA PROGRAM YANG DILAKUKAN MELALUI DINAS PERINDAG UNTUK MENGANTISIPASI HAL TERSEBUT.

I. BIRO PEREKONOMIAN

ANGGARAN TAHUN 2019 SEBESAR RP. 8.479.795.662 DENGAN REALISASI SEBESAR RP. 7.275.416.275 ATAU 85,87%.

C. BIDANG KEUANGAN

1. TERDAPAT PERBEDAAN DATA REALISASI APBD 2019 DI LAPORAN BAPENDA JABAR DENGAN DATA RILIS BANK INDONESIA;
2. BELUM OPTIMALNYA PENERIMAAN DANA PERIMBANGAN YANG BERSIFAT *GIVEN* (TERGANTUNG ALOKASI PEMERINTAH PUSAT) SEHINGGA PERLU LEBIH DIUPAYAKAN UNTUK DIKONSULTASIKAN DENGAN PEMERINTAH PUSAT;
3. RASIO ANGGARAN PENELUSURAN TIDAK SEBANDING DENGAN JUMLAH KTMDU (KENDARAAN TIDAK MELAKUKAN DAFTAR ULANG) SEHINGGA BERDAMPAK KURANG OPTIMALNYA HASIL PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR.
4. KAJIAN TIM TEKNIS YANG BERADA DILUAR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) SEPERTI DI DINAS PERTAMBANGAN, DAN LAIN - LAIN KARENA LOKASI DAN KEWENANGAN YANG BERBEDA MENYEBABKAN WAKTU PENYELESAIAN PERIZINAN MENJADI LEBIH LAMA DAN KOORDINASIPUN JADI AGAK SULIT DILAKUKAN KARENA BEDA KEWENANGAN.
5. PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2019 DI BIRO BUMD & INVESTASI TIDAK MAKSIMAL, HANYA TERSERAP SEKITAR 78%, PADAHAL SEBAGAI PEMBINA BUMD JAWA BARAT.

D. BIDANG PEMBANGUNAN

1. BERDASARKAN HASIL LAPORAN BAIK DARI INDIKATOR CAPAIAN KINERJA, REALISASI ANGGARAN, DAN KEGIATAN YANG TIDAK MENCAPI TARGET DARI MASING-MASING PERANGKAT DAERAH (DINAS/BADAN) VERSI KOMISI IV DAPAT DI KATAGORIKAN 2 (DUA) YAITU BAIK, DAN KURANG BAIK. ADAPUN DINAS YANG MEMPUNYAI KINERJA BAIK :
 - DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG
 - DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 - BAPPEDA
 - DINAS PERHUBUNGANSEMENTARA DINAS KINERJANYA KURANG BAIK :
 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 - DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
 - DINAS SUMBER DAYA AIR
2. BEBERAPA PROGRAM/KEGIATAN KURANG DIRENCANAKAN SECARA MATANG, TERLIHAT DARI BESARNYA SELISIH ANTARA REALISASI FISIK DIBANDING ANGGARAN YANG BERAKIBAT BEBERAPA KEGIATAN STRATEGIS TIDAK SELESAI. CONTOH SITU RAWA KALONG KOTA DEPOK DAN PENATAAN KALIMALANG KOTA BEKASI
3. LIMA KEGIATAN PROGRAM STRATEGIS GUBERNUR JAWA BARAT BERUPA TIGA KEGIATAN DI DINAS SUMBER DAYA AIR (SDA) YAITU PEMBANGUNAN SITU, SUNGAI DAN WADUK SERTA DUA KEGIATAN DI DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN YAITU *CREATIVE CENTER* DAN REVITALISASI ALUN – ALUN, TIDAK BERJALAN DENGAN BAIK (REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN SANGAT KECIL). PENYEBABNYA ADALAH :
 - TIDAK MATANGNYA PERENCANAAN SEHINGGA ANGGARAN YANG TERSERAP SANGAT KECIL.
 - PENGARUH DARI TIM AKSELERASI PEMBANGUNAN (TAP) DALAM MENDRIVE KEGIATAN SEHINGGA DINAS TAK BISA BANYAK BERBUAT, HAL INI TERLIHAT DARI DED (DETAIL ENGINEERING DESAIN) YANG BERASAL DARI CSR BUMD.

- PENANGANAN SUNGAI DAN SITU MERUPAKAN KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT BUKAN KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI. SEMENTARA CREATIVE CENTER DAN ALUN-ALUN ADALAH KEWENANGAN KOTA DAN KABUPATEN. ADA Pengerjaan ALUN-ALUN YANG TIDAK TERLAPORKAN.
- 4. UNTUK DINAS LINGKUNGAN HIDUP YANG MENJADI PERMASALAHAN ADALAH TIDAK TERSELESAIKANNYA TPPAS BAIK NAMBO MAUPUN LEGOK NANGKA DAN JUGA KEGIATAN PERLUASAN TPK SARIMUKTI BARU MENCAPAI 71,43% DARI ANGGARAN YANG TELAH DISIAPKAN SEBESAR RP 2.057.210.439,-
- 5. BANYAK PROGRAM YANG TERLALU BESAR KEINGINAN TAPI PELAKSANAANYA TIDAK SESUAI TARGET SEHINGGA MENAKIBATKAN PEMBENGGAKAN SILPA.

E. BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

1. PARA PENGAWAS PENDIDIKAN DI JAWA BARAT BELUM BERFUNGSI MAKSIMAL DAN JUMLAHNYA SANGAT KURANG. SEMENTARA BANYAK CALON PENGAWAS YANG SUDAH MENYELESAIKAN PENDIDIKAN TETAPI BELUM MENERIMA SK PELANTIKAN.
2. DAMPAK TIDAK TERALISASIKANNYA PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SEHINGGA ADA SMA ATAU SMK YANG MENUMPANG PADA SEKOLAH SD ATAU SMP, HAL INI BERIMBAS PADA PERTUMBUHAN PSIKOLOGIS PESERTA DIDIK SD/SMP.
3. MASIH ADA JURANG/GAP YANG BESAR TERKAIT ALOKASI ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI KEPADA SMA/SMK/SLB NEGERI DAN SWASTA, YANG DIPERLEBAR DENGAN REALISASI PROGRAM IURAN BULANAN PENDIDIKAN (IBP) GRATIS BAGI SMA/SMK/SLB NEGERI.
4. MASIH BANYAK KELUHAN MASYARAKAT TERHADAP AKURASI DATA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL, YANG BERAKIBAT TIMBULNYA KECEMBURUAN DI TENGAH-TENGAH MASYARAKAT.
5. PEKAN OLAHRAGA NASIONAL (PON) YANG SEMULA DI AGENDAKAN BULAN OKTOBER 2020 DI PAPUA DITUNDA PELAKSANAANNYA MENJADI OKTOBER 2021 HAL INI BERDAMPAK PADA BESARAN ANGGARAN HIBAH UNTUK KONI PROVINSI JAWA BARAT.
6. KEBERPIHAKAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT UNTUK FUNGSI PELESTARIAN BUDAYA MASIH SANGAT KURANG
7. PUBLIKASI BERBAGAI KEGIATAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN MASIH TIDAK OPTIMAL SEHINGGA MASYARAKAT TIDAK BISA MENDAPATKAN INFORMASI KEGIATAN TERSEBUT.
8. SECARA UMUM PERHATIAN TERHADAP CAGAR BUDAYA DAN SITUS ZIARAH RELIGI DI JAWA BARAT SANGAT KURANG. MISALNYA CAGAR BUDAYA LUHUR SANCANG DAN KAMPUNG DUKUH (KECAMATAN CIKELET) DI KABUPATEN GARUT YANG TIDAK TERAWAT, SERTA SITUS RELIGI SUNAN GUNUNG JATI CIREBON BELUM MENDAPAT PERHATIAN DAN BANTUAN ANGGARAN.
9. DATA YANG DIPERGUNAKAN SEBAGAI ACUAN PENERIMA BANTUAN IURAN BPJS DI JAWA BARAT KURANG AKURAT SEHINGGA BANYAK KELUHAN TERHADAP LAYANAN BPJS DI RUMAH SAKIT PEMERINTAH.
10. FASILITAS PUSKESMAS YANG BISA MELAYANI RAWAT INAP MASIH KURANG SEHINGGA MENYEBABKAN PANJANGNYA ANTRIAN DI RSUD / RUMAH SAKIT RUJUKAN
11. STRUKTUR PENGGAJIAN TENAGA KESEHATAN KHUSUSNYA DOKTER SPESIALIS LEWAT JALUR FUNGSIONAL TIDAK SEIMBANG DIBANDING JALUR STRUKTURAL. HAL INI MENYEBABKAN PARA DOKTER SPESIALIS CENDERUNG ENGGAN UNTUK MENJADI PIMPINAN STRUKTURAL DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD).
12. PERINGKAT INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA (IPP) JAWA BARAT MENCAPAI HASIL YANG MEMALUKAN YAITU RANKING KE-34 (URUTAN TERAKHIR) DARI 34 PROVINSI INDONESIA. INDEKS INI MENCAKUP ANTARA LAIN BIDANG PENDIDIKAN, GENDER, TENAGA KERJA, KESEHATAN DAN PEREKONOMIAN.

13. MASIH ADA 200 KECAMATAN DI JAWA BARAT YANG BELUM MEMILIKI SMA ATAU SMK NEGERI. SELAIN ITU, BANYAK SEKOLAH YANG TIDAK BISA MEMENUHI JUMLAH KEBUTUHAN PESERTA DIDIK KARENA KURANGNYA RUANG KELAS YANG TERSEDIA. INI MENYEBABKAN RENDAHNYA ANGKA SERAPAN KASAR DAN ANGKA SERAPAN MURNI UNTUK PENDIDIKAN SMA DAN SMK.
14. PARA GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI JAWA BARAT MENGHADAPI KENDALA BERUPA TERBATASNYA KESEMPATAN UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS SERTA KESEJAHTERAAN MEREKA.

SEBAGAIMANA DIMAKLUMI, PEMBAHASAN LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2019 MERUPAKAN MOMEN TRANSISI TERHADAP PENYELENGGARAAN KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH SELAMA TAHUN ANGGARAN 2019 YANG DIPIMPIN OLEH GUBERNUR BAPAK MOCHAMAD RIDWAN KAMIL DAN WAKIL GUBERNUR BAPAK UU RUZHANUL ULUM.

DALAM HAL INI, KAMI MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH DAN PENGHARGAAN ATAS KINERJA SAUDARA YANG TELAH DILAKSANAKAN KHUSUSNYA DI TAHUN 2019.

BANYAKNYA PENGHARGAAN DAN PENILAIAN NASIONAL PADA TAHUN 2019 YANG DITERIMA PROVINSI JAWA BARAT MENGINDIKASIKAN PRESTASI PENINGKATAN KINERJA PEMERINTAH DI JAWA BARAT. DALAM PELAKSANAANNYA MEMANG MASIH ADA BEBERAPA PERMASALAHAN YANG BELUM TUNTAS PADA BEBERAPA PROGRAM KEGIATAN PEMBANGUNAN, OPTIMALISASI PENANGANAN BERBAGAI MASALAH PENDIDIKAN, KESEHATAN, SOSIAL, DAN PEREKONOMIAN RAKYAT. SEMUA ITU HARUS MENJADI PERHATIAN DALAM PENUNTASAN PROGRAM KEGIATAN SELAJUTNYA.

SECARA UMUM LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 TELAH MEMBERIKAN INFORMASI YANG LENGKAP. HAL ITU BISA DILIHAT DARI INDIKATOR KESEJAHTERAAN. SECARA UMUM GUBERNUR TELAH MEMBERIKAN KONTRIBUSI TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT JAWA BARAT, KENDATI PERAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTA DI JAWA BARAT TIDAK KALAH PENTINGNYA DENGAN PERAN GUBERNUR.

DARI 3 (TIGA) ASPEK, YAKNI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, PENINGKATAN PELAYANAN UMUM, DAN PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH, SEBAGIAN BESAR INDIKATOR MEMPERLIHATKAN NILAI POSITIF.

KINERJA KEUANGAN DAERAH RELATIF BAIK, TERUTAMA PADA ASPEK PENDAPATAN DAERAH, SEMENTARA UNTUK ASPEK BELANJA DAERAH DAPAT DINILAI CUKUP.

SEBAGAI BAGIAN AKHIR DARI PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR JAWA BARAT AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 INI TELAH MENDAPAT MASUKAN DARI KOMISI TERKAIT KINERJA PERANGKAT DAERAH, MAKA PANITIA KHUSUS III MENYUSUN REKOMENDASI KEPADA PEMERINTAH JAWA BARAT SEBAGAI BERIKUT :

A. BIDANG PEMERINTAHAN:

1. MENINJAU ULANG DAN MENGEVALUASI KEBERADAAN, FUNGSI DAN AKTIVITAS TIM AKSELERASI PEMBANGUNAN (TAP) DAN TIM AKSELERASI JABAR JUARA (TAJJ). JIKA TERBUKTI ADA OKNUM TAP DAN/ATAU TAJJ YANG MELAKUKAN INTERVENSI TERHADAP PENGAMBILAN KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH YANG MENYEBABKAN TIDAK TERCAPAINYA TARGET PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2019 ATAU DAMPAK LAIN YANG BERSIFAT KONTRAPRODUKTIF MAKA KEBERADAANNYA HARUS DIBUBARKAN.

2. MELAKUKAN UPAYA-UPAYA PEMANTAPAN PENGELOLAAN DAN PENINGKATAN KINERJA PERANGKAT DAERAH MELIPUTI :

- a. PERANGKAT DAERAH HARUS MEMAHAMI & MENGUASAI TUPOKSINYA AGAR SEMUA TARGET TERCAPAI. JIKA ADA HAL-HAL YANG SIFATNYA DI LUAR TUPOKSI, HENDAKNYA PERANGKAT DAERAH YANG BERSANGKUTAN MENYAMPAIKAN KEBERATANNYA.
- b. MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN BAIK TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN YANG BERIRISAN DENGAN KEWENANGAN PUSAT ATAU KOTA/KABUPATEN.
- c. GUBERNUR HARUS MELAKUKAN EVALUASI DAN PERGANTIAN PIMPINAN PERANGKAT DAERAH YANG KINERJANYA BURUK, SERTA MENDORONG PELIBATAN ESELON III UNTUK MEMPERBAIKI KINERJA PERANGKAT DAERAH.
- d. MELAKUKAN PEMISAHAN BEBERAPA PERANGKAT DAERAH, GUNA PENGEMBANGAN FUNGSI KEDINASAN SECARA LEBIH BAIK LAGI. SEPERTI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN, DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN, DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.
- e. MENINGKATKAN MODEL DAN KAPASITAS KEPEMIMPINAN YANG BERSINERGI DAN KOLABORATIF DALAM MENYEBARLUASKAN KEBIJAKAN SERTA PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT.
- f. MENDORONG DILAKUKANNYA PEMISAHAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN MENJADI DINAS PERINDUSTRIAN DAN DINAS PERDAGANGAN, MENINGAT STRATEGISNYA SEKTOR INI. BAHKAN SEKTOR PERDAGANGAN ADALAH LAPANGAN USAHA TERBESAR PENDUDUK JAWA BARAT, SERTA MENYERAP TENAGA KERJA PALING BANYAK. SEMENTARA SEKTOR INDUSTRI MEMBERIKAN KEUNGGULAN PDRB BAGI JAWA BARAT SECARA NASIONAL.
- g. DALAM RANGKA MEMPERCEPAT PROSES PERIJINAN DAN MENGHINDARI PUNGUTAN LIAR, MAKA TIM TEKNIS PERANGKAT DAERAH DITEMPATKAN SECARA FUNGSIONAL DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP), PADA SATU PINTU ATAU SATU ATAP.
- h. MENINGKATKAN KOORDINASI ANTAR PERANGKAT DAERAH LINTAS SEKTORAL UNTUK MENGAWAL CAPAIAN TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN AGAR BERKONTRIBUSI SECARA SIGNIFIKAN TERHADAP INDIKATOR MAKRO EKONOMI JABAR
- i. BIRO PEREKONOMIAN HARUS BISA BERPERAN LEBIH SIGNFIKAN DALAM PENINGKATAN KUALITAS PROGRAM-PROGRAM DI PERANGKAT DAERAH, TERUTAMA DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN DYNAMIC GOVERNMENT YANG MENGUTAMAKAN PROGRAM YANG BERSIFAT ANTISIPATIF, ADAPTIF LINTAS SEKTORAL.

SELAIN JUGA HARUS MAMPU MENJADI KATALISATOR MEMPERCEPAT IMPLEMENTASI REGULASI PERATURAN DAERAH YANG ADA SEPERTI PERDA PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI, PERDA PENGEMBANAN EKONOMI KREATIF, PERDA PERLINDUNGAN DAN PERMBERDAYAAN PEMBUDIDAYA IKAN DAN PETAMBAK GARAM, PERDA KEWIRAUSAHAAN DAERAH SERTA PERDA PUSAT DISTRIBUSI PROVINSI.

3. MELAKUKAN UPAYA-UPAYA PERBAIKAN DAN PEMANTAPAN PROGRAM DAN KEGIATAN MELIPUTI :

- a. MENDUKUNG USULAN PERSIAPAN PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU DI TINGKAT KABUPATEN KOTA DAN PEMEKARAN DESA DI JAWA BARAT.

- b. Mendukung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dalam peningkatan sarana dan prasarana serta program pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN), sehingga dapat menambah pendapatan asli daerah (PAD).
- c. Mendukung program pengembangan komunikasi, informasi, media massa dan pemanfaatan teknologi informasi.
- d. Menerjemahkan dan mensinergikan visi Jabar Juara Lahir Batin dengan inovasi dan kolaborasi ke dalam tupoksi perangkat daerah agar dapat diimplementasikan sejalan dengan target RPJMD.
- e. Menyesuaikan volume program/kegiatan tahunan tiap perangkat daerah untuk bisa fokus pada pengembangan program/komoditas unggulan dengan porsi pembiayaan yang lebih besar. dan meningkatkan program yang bersifat transformatif, bukan memperbanyak yang basic activity atau basic office.
- f. Mendukung program penataan administrasi kependudukan dan pengadaan sarana prasarana yang memadai, serta pengadaan jaringan yang stabil di kab/kota.
- g. Melakukan upaya peningkatan sistem pengendalian internal, penyempurnaan regulasi tentang kebijakan akuntansi dan pengelolaan barang milik daerah, peningkatan kapasitas aparatur penyusun laporan keuangan, agar dapat mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).
- h. Mengevaluasi dan memastikan kelengkapan produk hukum daerah di kabupaten kota serta melakukan penataan peraturan perundang-undangan, kesadaran hukum dan HAM, serta program sosialisasi.
- i. Mendukung pengembangan aparatur sipil negara (ASN) yang handal, serta sarana prasarana yang memadai dalam pelaksanaan fungsi pelayanan baik di bidang pembentukan peraturan daerah, anggaran maupun pengawasan.
- j. Meningkatkan sumber daya manusia arsiparis, serta perlunya inovasi dan adaptasi teknologi dalam bidang kearsipan mengingat pentingnya arsip baik dalam aspek sejarah maupun aspek hukum di kemudian hari.
- k. Mendukung upaya pencapaian indeks profesionalisme aparatur sipil negara (ASN) dan penerapan merit system.
- l. Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga pengawas fungsional di lingkungan pemerintah provinsi Jawa Barat.
- m. Melakukan pendataan dan pengawasan pelaksanaan kerjasama kemitraan dengan CSR dan PKBL agar program dapat lebih terarah dan lebih dirasakan manfaatnya.
- n. Memenuhi kewajiban pada RPJMD Jawa Barat 2018–2023 (Perda No. 8/2019) harus segera menjadi skala prioritas, yaitu :
 - Program Rutilahu sebanyak 100 ribu selama 5 tahun sampai 2023, sejak 2018 dan 2019 baru terpenuhi sebagian. Maka tahun 2021 minimal 27 ribu unit rumah yang harus mendapat program Rutilahu.
 - Fasilitas perleengkapan jalan pada tahun 2019 dengan target capaian 37,67% baru tercapai 33,85%. Untuk itu pemerintah provinsi Jawa Barat harus menambah anggaran, khususnya fasilitas lalu lintas.

- o. MEMASTIKAN BAHWA SETIAP PERUSAHAAN YANG BEROPERASI DI WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT MAKA KENDARAAN OPERASIONALNYA WAJIB TERDAFTAR DI SAMSAT WILAYAH JAWA BARAT.
- 4. MELAKUKAN UPAYA-UPAYA PERBAIKAN DAN PEMANTAPAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN MELIPUTI :
 - a. MENYIAPKAN DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) LEBIH AWAL UNTUK DAPAT DITINDAKLANJUTI KEMUDIAN.
 - b. MENJADIKAN RPJMD 2018-2023 SEBAGAI LANDASAN PELAKSANAAN PROGRAM-PROGRAM STRATEGIS DAN DALAM MENENTUKAN PROGRAM PRIORITAS.
 - c. MEMASTIKAN ADANYA KESESUAIAN ANTARA ISU STRATEGIS DENGAN PROGRAM STRATEGIS DAN PROYEK STRATEGIS.
 - d. MENINGKATKAN KUALITAS DATA DAN INFORMASI YANG AKURAT DAN TERKINI SEBAGAI BASIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN.

B. BIDANG PEREKONOMIAN

- 5. MENINGKATKAN ANGGARAN BIDANG PEREKONOMIAN AGAR DAPAT MEMENUHI TERCAPAI.
- 6. MELAKUKAN ANTISIPASI KECENDERUNGAN DEINDUSTRIALISASI KARENA PENURUNAN DALAM LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI DARI SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN DAN RELOKASI PABRIK-PABRIK DARI JAWA BARAT KE JAWA TENGAH ATAU KELUAR NEGERI YANG SEMAKIN MASIF. SEHINGGA PERLU ADA ANTISIPASI PERALIHAN SEKTOR EKONOMI UTAMA DI MASA YANG AKAN DATANG, TERUTAMA KEPAD AGROINDUSTRI, INDUSTRI KREATIF, DAN INDUSTRI PARIWISATA.
- 7. MENJADIKAN DINAS PERDAGANGAN SEBAGAI FUNGSI MARKETER YANG DAPAT MENSERTIFIKASI, STANDARISASI, BRANDING DAN MENJUAL PRODUK-PRODUK JAWA BARAT KE DUNIA INTERNASIONAL. EKSPOR HARUS TERUS DIGENJOT SEBAGAI UJUNG TOMBAK PEREKONOMIAN JAWA BARAT. MAKA DIPERLUKAN SDM YANG MEMILIKI KOMPETENSI SEBAGAI PEMASARAN DAN MEMPUNYAI WAWASAN GLOBAL. INI SEMUA TIDAK TERCERMIN DALAM PROGRAM TAHUN 2019 YANG HANYA MENYEDIAKAN ANGGARAN SANGAT KECIL BAGI PENGEMBANGAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, SEHINGGA BAHKAN TARGET LAJU PERTUMBUHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI NEGATIF.
- 8. MENINGKATKAN PENGELOLAAN DAN REVITALISASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH MELALUI :
 - a. MENGEMBANGKAN KERJASAMA INDUSTRI KECIL MENENGAH DAN BESAR DALAM RANGKA PENGUATAN RANTAI PASOK PRODUK DAN PRODUK PENDUKUNG.
 - b. MENGIMPLEMENTASIKAN PERDA KEWIRAUSAHAAN DAERAH UNTUK MENDORONG AGAR PARA PELAKU USAHA DAPAT SEGERA NAIK KELAS, KHUSUSNYA USAHA MIKRO MENJADI USAHA KECIL, USAHA KECIL MENJADI USAHA MENENGAH ATAU BESAR.
 - c. MEMBENTUK LEMBAGA DANA BERGULIR YANG AKAN MEMBERIKAN KEMUDAHAN AKSES PERMODALAN BAGI PELAKU USAHA YANG TIDAK BANKABLE SEPERTI USAHA MIKRO, PETANI, NELAYAN, PETERNAK DAN LAIN-LAIN MENINGAT KARAKTER JAWA BARAT YANG MASYARAKATNYA SANGAT BANYAK BERGERAK DI BIDANG USAHA MIKRO KECIL, YAITU MENCAPAI LEBIH DARI 98% DARI TOTAL PELAKU USAHANYA. DIANTARANYA ADALAH DENGAN SERTA PERLU FASILITASI BERUPA PROGRAM YANG MEMBERIKAN KEMAMPUAN PADA PARA PELAKU USAHA UNTUK BISA BERBISNIS MELALUI MEDIA DIGITAL ONLINE SECARA LEBIH CANGGIH DAN

LUAS. DI ERA EKONOMI DIGITAL INI SEMUA PELAKU USAHA DI JAWA BARAT, TERMASUK KOPERASI HARUS MEMILIKI KEMAMPUAN MEMANFAATKAN PLATFORM DIGITAL, SEPERTI MARKET PLACE, APLIKASI MOBILE KEUANGAN, BIG DATA, MARKETING SOSIAL MEDIA DAN LAIN-LAIN.

- d. MENGEMBANGKAN KERJASAMA DENGAN LEMBAGA KEUANGAN DAN INSTITUSI LAIN UNTUK MEMBERIKAN KEMUDAHAN AKSES INFORMASI PEMBIAYAAN PENYEDIAAN MODAL USAHA, KHUSUSNYA USAHA KECIL.
9. MENINGKATKAN PENGELOLAAN DAN UPAYA AKSELERASI FUNGSI PASAR MELALUI :
- a. MEMBERIKAN PERHATIAN TERHADAP PENTINGNYA PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAWASAN TERHADAP BARANG YANG BEREDAR BAIK DI PASAR TRADISIONAL MAUPUN DI TOKO MODERN.
 - b. MELANJUTKAN KEMBALI REVITALISASI PASAR DAN MEMPERKUAT PASAR TRADISIONAL DENGAN STANDAR YANG DITINGKATKAN.
 - c. MENGHUBUNGKAN SENTRA-SENTRA PENGHASIL BAHAN BAKU DENGAN INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PASAR.
 - d. MENINGKATKAN ANGGARAN PROGRAM STRATEGIS REVITALISASI PASAR DAN PEMBANGUNAN PASAR NYA TIDAK PARSIAL TETAPI SATU PASAR DI BANGUN UTUH DAN TUNTAS.
 - e. MENGIMPLEMENTASIKAN SEGERA PERDA PUSAT DISTRIBUSI JAWA BARAT, TERMASUK PENYUSUNAN ATURAN HUKUM TURUNANNYA (PERGUB).
10. MELAKUKAN UPAYA AKSELERASI SEKTOR PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN MELALUI :
- a. MENINGKATKAN ANGGARAN UNTUK SEKTOR PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN PERKEBUNAN DALAM RANGKA MENGOKOHKAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA BARAT HINGGA 20%.
 - b. MENGANTISIPASI BERKURANGNYA TENAGA PENYULUH PERTANIAN DENGAN MENGANGKAT TENAGA HONORER MENJADI ASN.
 - c. MEMPERBANYAK PROGRAM BANTUAN UNTUK KELOMPOK PETERNAK, PETANI (TERMASUK PEMULIA TANAMAN PANGAN), NELAYAN, PEMBUDIDAYA IKAN DAN PETAMBAK GARAM SECARA MERATA DI SELURUH KABUPATEN KOTA DI JAWA BARAT.
 - d. MEMFOKUSKAN KEGIATAN-KEGIATAN DINAS PERTANIAN PADA UPAYA PENINGKATAN NILAI TUKAR PETANI (NTP) ATAU PROGRAM YANG SECARA LANGSUNG BISA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN.
 - e. MENYUSUN CETAK BIRU SEKTOR PETERNAKAN JAWA BARAT YANG MENUNJUKKAN TARGET JANGKA PANJANG UNTUK MENGANTISIPASI KEBUTUHAN PANGAN DI MASA YANG AKAN DATANG DAN MENYEDIAKAN LAPANGAN KERJA YANG MENSEJAHTERAKAN.
 - f. MENINGKATKAN KEUNGGULAN JAWA BARAT PADA PETERNAKAN AYAM POTONG DAN DOMBA DI TINGKAT NASIONAL DENGAN MEMBERIKAN FASILITAS DAN PENDAAN YANG LEBIH BESAR SETIAP TAHUNNYA, AGAR KETERSEDIAAN PANGAN DI JAWA BARAT KHUSUSNYA DAGING AYAM DAN DAGING DOMBA BISA TERJAMIN DIMASA YANG AKAN DATANG DAN LEBIH BANYAK LAGI MASYARAKAT YANG TERTARIK UNTUK MENJADI PELAKU USAHA PETERNAKAN.
 - g. MENAIKKAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA, DALAM RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PARA NELAYAN KECIL, KARENA KEWENANGANNYA BERADA DI KABUPATEN/KOTA.
11. MEMBANGUN FASILITAS, SARANA, DAN PRASARANA SEPERTI BREAKWATER, KAWASAN BUDIDAYA, KERJASAMA PENELITIAN DAN LAIN-LAIN YANG SELAMA PERIODE 2019 BELUM DIPROGRAMKAN OLEH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN.

12. MELAKUKAN PERBAIKAN PENGELOLAAN DAN REVITALISASI BUMD MELALUI :
 - a. MENYUSUN PROGRAM/KEGIATAN YANG MENDORONG SELURUH BUMD JAWA BARAT SELAIN SEBAGAI AGEN PEMBANGUNAN JUGA DAPAT MENINGKATKAN PAD, YANG DIBUAT OLEH BIRO TERKAIT.
 - b. MEMASTIKAN RENCANA BISNIS SETIAP BUMD HARUS SESUAI DENGAN MAKSUD DAN TUJUAN AWAL DIDIRIKANNYA BUMD SERTA AKTA PENDIRIANNYA, SEHINGGA DALAM PERJALANANNYA DAPAT MENGHASILKAN PERUSAHAAN YANG SEHAT DAN PROFITABLE.
 - c. MEMBENTUK PANITIA KHUSUS GUNA MENGEVALUASI KINERJA DARI SETIAP BUMD.
 - d. MENYERTAKAN HASIL KAJIAN KEPADA DPRD TENTANG USULAN PENYERTAAN MODAL KEPADA BUMD YANG DIBUAT OLEH TIM PENASIHAT INVESTASI.
 - e. MENINGKATKAN PROFESIONALISME DI LEVEL MANAJEMEN PERUSAHAAN GUNA MENINGKATKAN KINERJA BUMD
 - f. MENGEVALUASI KINERJA PIMPINAN BUMD, KHUSUSNYA KEPADA BUMD YANG KINERJANYA KURANG MAKSIMAL / BELUM MEMBERIKAN PAD. HARUS DIBERIKAN SANKSI KEPADA DIREKSI BUMD YANG TIDAK SECARA SIGNIFIKAN MEMBERIKAN KEUNTUNGAN SERTA PENINGKATAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT JAWA BARAT.
 - g. MELAKUKAN INVENTARISASI ASET-ASET BUMD DAN PENYELESAIAN ASET-ASET YANG BERMASALAH.
 - h. MEMFOKUSKAN PROGRAM PADA BISNIS YANG DIKELOLANYA, JANGAN TERLALU BANYAK ANAK PERUSAHAAN YANG TERUS ADA.
 - i. SECARA KHUSUS BAGI BUMD DI BIDANG KEUANGAN AGAR PERAN BADAN PENGAWAS PADA PT/PD BPR/PD PK DITINGKATKAN. BPR SEBAGAI BANK YANG BERSENTUHAN DENGAN MASYARAKAT KECIL SAMPAI SAAT INI PERKEMBANGAN BISNISNYA CUKUP BAGUS, WALAUPUN KECIL DEVIDEN YANG DIBERIKAN LANCAR DAN MEMBANTU PEREKONOMIAN MASYARAKAT KECIL. BAHKAN BPR HARUS DIPERHATIKAN DALAM PEMENUHAN PENYERTAAN MODAL AGAR SEMAKIN BERKEMBANG DAN MEMBERIKAN DEVIDEN YANG LEBIH BESAR, SERTA MEMBANTU DALAM MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT.
 - j. MELAKUKAN PERCEPATAN OPERASIONAL BUMD DENGAN CORE BISNIS BERSKALA BESAR SEPERTI PT. BIJB, PT MIGAS HULU JABAR, AGAR BENAR-BENAR DIPERHATIKAN SEHINGGA PENYERTAAN MODAL YANG SUDAH DIBERIKAN DAPAT CEPAT DIRASAKAN MANFAATNYA OLEH MASYARAKAT.
 - k. TERHADAP PENYERTAAN MODAL YANG DIBERIKAN KEPADA BJB SEBESAR 76 MILYAR RUPIAH DI TAHUN 2018 YANG DISIMPAN DI BJB DALAM BENTUK DEPOSITO, HARUS SEGERA DIJADIKAN SEBAGAI SILPA, SESUAI PERUNTUKAN SEMULA SEBAGAIMANA YANG TELAH DIPUTUSKAN BERSAMA DENGAN DPRD.
13. MENGUPAYAKAN AGAR PERUSAHAAN YANG BEROPERASI DI WILAYAH JAWA BARAT, MEMINDAHKAN KANTOR PUSATNYA KE WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT.
14. DINAS SUMBER DAYA AIR HARUS FOKUS PADA TUPOKSI UTAMANYA, YAITU PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH IRIGASI TUNTAS DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN DAERAH.

C. BIDANG KEUANGAN

15. MENINGKATKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK DIGITALISASI, SERTIFIKASI DAN PENGAMANAN ASET-ASET MILIK PEMPROV JABAR.
16. MEMFUNGSIKAN SEGERA ASET BANGUNAN PEMPROV JABAR EX BIOSKOP DIAN YANG TIDAK TERAWAT.
17. MELAKUKAN KAJIAN DAN KOMUNIKASI INTENSIF TERHADAP POTENSI FAKTUAL SEBAGAI PEMBANDING PERHITUNGAN YANG DITETAPKAN OLEH PUSAT YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL ATAS PAJAK-PAJAK YANG DIKELOLA OLEH PUSAT.
18. OPTIMALISASI PENANAMAN MODAL, BAIK ASING (PMA) MAUPUN DALAM NEGERI (PMDN) UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING TERMASUK PRODUKTIVITAS YANG SIGNIFIKAN UNTUK MEMAJUKAN PEREKONOMIAN DAERAH DAN LEBIH KHUSUS DAPAT MENINGKATKAN PENINGKATAN PAD.
19. MEMBUAT PEMETAAN POTENSI UNTUK MELIHAT ALIRAN INVESTASI DI JAWA BARAT DAN PERLUASAN PENYEBARAN POTENSI INVESTASI, SEHINGGA SELURUH KOMODITI YANG ADA DI BERBAGAI KAWASAN DI JAWA BARAT DAPAT DIPROMOSIKAN.

D. BIDANG PEMBANGUNAN

20. MENINGKATKAN PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN SEKTOR PERTAMBANGAN MELALUI :
 - a. PEMUTAKHIRAN DATA TERKAIT PERIJINAN TAMBANG PERMUKAAN.
 - b. MEMBENTUK TIM PENGAWASAN DARI DAMPAK PERIJINAN YANG SUDAH DIKELUARKAN, SEPERTI SAAT ADA MASALAH TERJADI LONGSOR DI GALIAN C, PENCEMARAN KARENA LIMBAH PABRIK, DLL.
 - c. MEMBERIKAN PERHATIAN KHUSUS TERHADAP PENAMBANGAN LIAR YANG MERUSAK LINGKUNGAN, PENCEMARAN SITU DAN SUNGAI.
 - d. DALAM RANGKA MENGOPTIMALKAN PENGAWASAN TERHADAP USAHA PENAMBANGAN, PERUSAHAAN DAN INDUSTRI YANG MENAKIBATKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP, MAKA PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT HARUS MENGAMBIL TINDAKAN TEGAS. SELAIN ITU DIBUTUHKAN PENAMBAHAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN ANGGARAN.
 - e. SEGERAKAN BANGUN JALAN TAMBANG DI KABUPATEN BOGOR.
21. PENERIMAAN PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) YANG BELUM OPTIMAL AGAR DIKOORDINASIKAN DENGAN INSTANSI TERKAIT BERKAITAN DENGAN SINKRONISASI REGULASI.
22. MELAKUKAN REVITALISASI DAN PEMANTARAP SEKTOR PARIWISATA MELALUI :
 - a. MENJADIKAN PARIWISATA SEBAGAI SEKTOR PRIORITAS PEMERINTAH JAWA BARAT YANG DITANDAI DENGAN DITINGKATKANNYA ALOKASI PENDANAAN BAGI PENGEMBANGAN PARIWISATA, KHUSUSNYA BAGI PENINGKATAN KUALITAS SDM PARIWISATA, PROMOSI ICON PARIWISATA JAWA BARAT, PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PERHUBUNGAN PENUNJANG PARIWISATA, SERTA PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA TERPADU YANG POTENSIAL.
 - b. MELAKUKAN KAJIAN DAN REALISASI PEMBENTUKAN DESTINASI WISATA YANG TERPADU, MENCAKUP BERBAGAI CAGAR BUDAYA, SITUS BUDAYA RELIGI, SERTA INDUSTRI KREATIF BERBASIS BUDAYA LOKAL.
 - c. TERKAIT PARAWISATA SEBAGAI LOKOMOTIF EKONOMI JAWA BARAT HARUS DI BUAT GRAND DISAIN SECARA UTUH AGAR PEMBANGUNAN DESTINASI WISATA SEJALAN DENGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN SEPERTI JALAN RAYA, KERETA API DAN JALUR UDARA.

- d. MENINGKATKAN PUBLIKASI DAN PROMOSI KEGIATAN PARIWISATA DAN BUDAYA JAWA BARAT DENGAN MEMANFAATKAN TEKNOLOGI INFORMASI MUTAKHIR DAN MENJANGKAU KALANGAN MILENIAL.
 - e. MELIBATKAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KHUSUSNYA MASYARAKAT DI PEDESAAN YANG SERINGKALI JUSTRU HANYA MENJADI PENONTON DI KAWASAN PARIWISATA.
 - f. MELAKUKAN PERUBAHAN STRATEGI DAN PROGRAM PROMOSI PARIWISATA JAWA BARAT TERMASUK MELAKUKAN RESTRUKTURISASI TERHADAP FUNGSI BADAN PROMOSI PARIWISATA YANG SUDAH SAATNYA MENYESUAIKAN DIRI DENGAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN EKONOMI DIGITAL, MULAI MEMANFAATKAN BERBAGAI APLIKASI MOBILE DAN TEKNOLOGI TERBARU SEPERTI ARTIFICIAL INTELLIGENT, BIG DATA, DAN LAIN SEBAGAINYA.
 - g. MELAKUKAN SERTA TEROBOSAN DALAM PROGRAM KEGIATAN DI BADAN PENGHUBUNG TERUTAMA TERKAIT PROMOSI JAWA BARAT DI ANJUNGAN TAMAN MINI INDONESIA INDAH.
23. MELAKUKAN PENATAAN ULANG KEBERADAAN CABANG DINAS KEHUTANAN DI JAWA BARAT KEDEPAN DENGAN MENGACU PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. KONDISI YANG ADA SEKARANG JAUH DARI MEMADAI UNTUK MENGAWASI, MENGELOLA DAN PEMANFAATAN HUTAN BAGI KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KELESTAIAN LINGKUNGAN HIDUP. DAN SEGERA DITAMBAH MINIMAL 2 CABANG DINAS KEHUTANAN DI KAB. BANDUNG BARAT DAN SUBANG SERTA CABANG DINAS KHUSUS HUTAN MANGROVE. KARENA SAAT INI MENUNJUKKAN PERTAMBAHAN LUASAN HUTAN DI JAWA BARAT DAN JUGA LUASAN KAWASAN LINDUNG, YANG PERLU SEGERA DIPERHATIAN AGAK TETAP LESTARI DAN TERUS BERTAMBAH SESUAI KONDISI IDEAL YANG DICANTUMKAN DALAM DOKUMEN RPJPD JAWA BARAT, YAITU MENCAPAI 45% KAWASAN LINDUNG DAN 33% LUAS TUTUPAN HUTAN
24. MERANCANG PROGRAM KHUSUS BISNIS PERHUTANAN KHUSUSNYA KOMODITAS KAYU YANG MAMPU MEMBERIKAN JAMINAN BAHWA EKSPLOITASINYA TIDAK BERDAMPAK PADA KESEIMBANGAN LINGKUNGAN, SALAH SATUNYA ADALAH DENGAN MENDORONG MASYARAKAT DESA MEMANFAATKAN LAHAN DI DESANYA UNTUK BERUSAHA DI SEKTOR KEHUTANAN YANG TERBUKTI MEMBERIKAN KESEJAHTERAAN CUKUP BAIK BAGI PELAKU USAHANYA.
25. MENINGKATKAN ANGGARAN DINAS KEHUTANAN, KARENA ADANYA PELIMPAHAN KEWENANGAN DAN JUMLAH SDM SERTA PERLUASAN WILAYAH KERJA, TERMASUK PENANGANAN LAHAN KRITIS DI SELURUH JAWA BARAT.
26. UNTUK PROGRAM DAN KEGIATAN TPPAS REGIONAL LULUT NAMBO DAN LEGOK NANGKA, GUBERNUR HARUS PRO AKTIF BERKOMUNIKASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT AGAR MEMBERIKAN SUBSIDI TIPPING FEE.
27. TERKAIT DENGAN TPPAS REGIONAL LEGOK NANGKA, PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT HARUS SEGERA MENGAMBIL SEMUA LANGKAH YANG DIMUNGKINKAN UNTUK MEMASTIKAN BAHWA PROSES LELANG INVESTASI DALAM TPPAS REGIONAL LEGOK NANGKA DAPAT SEGERA DISELESAIKAN DAN BEROPERASI, SEHINGGA DAPAT MELAYANI PENGOLAHAN SAMPAH DARI SEMUA KABUPATEN/KOTA DI BANDUNG RAYA. APABILA TERDAPAT BUKTI YANG SAHIF BAHWA KETERLAMBATAN PELAKSANAAN LELANG INVESTASI DAN PEMBANGUNAN TPPAS TERSEBUT KARENA KEKURANG CAKAPAN PARA PENGELOLANYA, AGAR DILAKUKAN PENGGANTIAN OLEH PEJABAT YANG MEMILIKI KEMAMPUAN DAN INTEGRITAS YANG BAIK.

28. MEMBANGUN FASILITAS AIR BERSIH SEBAB BANYAK DAERAH DI JAWA BARAT MENGALAMI KEKERINGAN KETIKA MUSIM KEMARAU.
29. TERKAIT PERMASALAHAN KASUS PENCEMARAN LINGKUNGAN YANG DIAKIBATKAN OLEH TUMPAHAN MINYAK DI PESISIR PANTAI KARAWANG, PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT HARUS MEMBENTUK TIM PAKAR INDEPENDEN UNTUK MELAKUKAN PENILAIAN ATAS INSIDEN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT KEBOCORAN MINYAK DI PANTAI KARAWANG DAN BERTUGAS MELAKUKAN EVALUASI SECARA MENYELURUH DAN MELAKUKAN VALUASI EKONOMI ATAS KERUGIAN YANG DITIMBULKAN. BERDASARKAN HASIL PENILAIAN APABILA MENEMUKAN TERJADINYA PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP, MAKA KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP HARUS MELAKUKAN GUGATAN KEPADA PT. PERTAMINA ATAS KERUGIAN DIALAMI OLEH MASYARAKAT, PEMERINTAH DAN LINGKUNGAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 90 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG LINGKUNGAN HIDUP.
30. OPTIMALISASI TPPAS REGIONAL LULUT NAMBO, DENGAN LANGKAH SEBAGAI BERIKUT :
 - a. MELAKUKAN INVESTIGASI ATAS TERJADINYA KETERLAMBATAN PENYELESAIAN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN TPPAS LULUT NAMBO;
 - b. MENINDAK SECARA TEGAS PARA PIHAK (KEPALA DLH, KEPALA UPTD PSTR DAN/ATAU MANAJEMEN PT. JBL) YANG DIDUGA MENYEBABKAN TERJADINYA KETERLAMBATAN PENYELESAIAN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN TPPAS REGIONAL LULUT NAMBO, SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANG;
 - c. MEMASTIKAN BAHWA TPPAS REGIONAL LULUT NAMBO DAPAT SEGERA DISELESAIKAN DAN BEROPRASI, SEHINGGA DAPAT MELAYANI PENGOLAHAN SAMPAH DARI SEMUA KABUPATEN/KOTA DI BOGOR RAYA, SESUAI RENCANA.

E. BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

31. MENINGKATKAN ANGGARAN, SARANA PRASARANA DAN SUMBER DAYA MANUSIA UNTUK PELAKSANAAN URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.
32. IMPLEMENTASI KEGIATAN ONE PESANTREN ONE PRODUCT (OPOP) HARUS LEBIH JELAS DAN TRANSPARAN. BENTUK KEGIATANNYA HARUS DISESUAIKAN DENGAN POTENSI PESANTREN DI JAWA BARAT DAN PENYELENGGARAANNYA DALAM BENTUK HIBAH KEPADA PESANTREN, DI BAWAH BIRO PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN SOSIAL.
33. PROGRAM SATU DESA SATU HAFIDZ (SADESHA), SEBAGAI PROGRAM UNGGULAN, KUOTANYA HARUS DITAMBAH. KHUSUSNYA UNTUK HAFIDZ QURAN 30 JUZ.
34. WAJIB MELAKUKAN ANTISIPASI KEBENCANAAN DENGAN PENYEDIAAN ANGGARAN YANG LAYAK SERTA MENCUKUPI KEBUTUHAN ANTARA LAIN : DATA KEBENCANAAN, MITIGASI BENCANA, TANGGAP DARURAT, BUFFERSTOCK, KAMPUNG SIAGA BENCANA, SERTA SARANA PRASARANA PENDUKUNG REHABILITASI DAN REKONTRUKSI.
35. MELAKUKAN UPAYA-UPAYA PERBAIKAN PENGELOLAAN SISTEM DAN PEMANTAPAN SEKTOR PENDIDIKAN MELIPUTI :
 - a. MERANCANG BIRU RENCANA PENAMBAHAN SEKOLAH BARU DAN RUANG KELAS BARU YANG MENJADI ACUAN BAGI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN PROGRESNYA DIPANTAU SETIAP TAHUN SEBAGAI BAGIAN DARI PENCAPAIAN LKPJ GUBERNUR.

- b. WAJIB MEMILIKI PROGRAM TERPADU UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS DAN KESEJAHTERAAN GURU, KEPALA SEKOLAH, PENGAWAS, TENAGA TATA USAHA SERTA TENAGA KEPENDIDIKAN.
 - c. MENINGKATKAN BEASISWA BAGI SISWA DAN MAHASISWA YANG TIDAK MAMPU YANG BERPRESTASI SERTA MENYEDIAKAN ASRAMA BAGI PENERIMA BEASISWA.
 - d. MENEMUKAN FORMULASI PEMBIAYAAN BPMU BAGI SEKOLAH SWASTA DAN IURAN BULANAN PENDIDIKAN GRATIS BAGI SEKOLAH NEGERI DENGAN MEMPERHATIKAN :
 - a. ACUAN UNTUK BPMU SEBESAR RP. 1 JUTA PER PESERTA DIDIK PERTAHUN
 - b. PEMBEDAAN ANTARA SEKOLAH SWASTA YANG MENERIMA SISWA DENGAN SKTM DENGAN YANG TIDAK
 - c. PEMBEDAAN ANTARA PESERTA DIDIK SEKOLAH NEGERI YANG MAMPU DAN YANG TIDAK MAMPU.
 - e. KEBERPIHAKAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PELESTARIAN SENI DAN BUDAYA HARUS DITINGKATKAN. DAN RESTRUKTURISASI ORGANISASI YANG MENEMPATKAN BIDANG BUDAYA MENJADI BAGIAN DARI DINAS PENDIDIKAN.
 - f. SEGERA MELANTIK CALON PENGAWAS YANG SUDAH MENYELESAIKAN PENDIDIKAN TERKAIT DAN MEMBUAT PERENCANAAN FORMASI KEBUTUHAN PENGAWAS SESUAI STANDAR SATU PENGAWAS UNTUK TUJUH SEKOLAH (1:7)
 - g. PUSAT PENDIDIKAN LATIHAN BELAJAR (PPLB) HARUS LEBIH DIBERDAYAKAN
 - h. ANGGARAN PEMBANGUNAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN AGAR DIBERIKAN PORSI YANG MEMADAI, TERMASUK MENAIKAN ANGGARAN PEMBUATAN POJOK INFAKUASI PEMBANGUNAN JAWA BARAT DARI KANTOR-KANTOR DESA DAN KELURAHAN.
36. MELAKUKAN UPAYA-UPAYA PERBAIKAN PENGELOLAAN SISTEM DAN PENGELOLAAN SEKTOR KESEHATAN MELIPUTI :
- a. PERHATIAN KHUSUS TERHADAP PEMERATAAN TENAGA MEDIS DAN TENAGA AHLI DI SEMUA RUMAH SAKIT MILIK PROVINSI.
 - b. MELAKUKAN PERUMUSAN BARU STRUKTUR REMUNERASI TENAGA DOKTER SPESIALIS YANG MENINGKATKAN MOTIVASI PARA DOKTER SPESIALIS UNTUK MENJADI PEJABAT STRUKTURAL DI RSUD DI JAWA BARAT.
 - c. WAJIB MELAKUKAN PROGRAM PENINGKATAN STATUS PUSKESMAS MINIMAL ADA SATU FASILITAS PUSKESMAS RAWAT INAP DI TIAP KECAMATAN.
 - d. MENINGKATKAN KERJASAMA ANTARA DINAS KESEHATAN DAN DINAS SOSIAL DI TINGKAT PROVINSI DAN KABUPATEN KOTA UNTUK MENYUSUN DATA YANG AKURAT TERKAIT PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) BPJS KESEHATAN.
 - e. MELAKUKAN KOMUNIKASI DENGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR UNTUK MENJADIKAN RSUD KOTA BOGOR SEBAGAI RUMAH SAKIT RUJUKAN REGIONAL SESUAI MEKANISME YANG BERLAKU.

37. MENINGKATKAN PERHATIAN TERHADAP PELATIHAN KERJA MANDIRI YANG DISELENGGARAKAN BALAI PELATIHAN KERJA MANDIRI DENGAN MENEKANKAN PADA KETERAMPILAN DALAM PENGUASAAN TEKNOLOGI. PERLU ADA PENINGKATAN JUMLAH DAN KAPASITAS PELAYANAN BALAI LATIHAN KERJA UNTUK MEMPERSIAPKAN ALUMNI SMA DAN SMK DALAM MEMASUKI DUNIA KERJA.
38. MENGEMBANGKAN PROGRAM KOTAK LITERASI CERDAS (KOLECER) DAN MENYOSIALISASIKANNYA AGAR LEBIH MENJANGKAU MASYARAKAT SAMPAI DI TINGKAT PEDESAAN.
39. MENINGKATKAN CAKUPAN PROGRAM SEKOLAH PEREMPUAN CAPAI IMPIAN DAN CITA-CITA (SEKOPER CINTA), DENGAN MEMPERHATIKAN PENGELOLAAN LULUSANNYA, SERTA MENGINTEGRASIKAN DALAM PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA (IPP) DAN INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG).
40. MELAKUKAN SOSIALIASI PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN (PUP) KEPADA MASYARAKAT.
41. ATLET YANG BERKEBUTUHAN KHUSUS HARUS LEBIH DIUTAMAKAN SERTA MENDAPATKAN PERHATIAN LEBIH OLEH PEMPROV JABAR
42. MENINGKATKAN PROGRAM PEMBINAAN PEMUDA MELALUI :
 - a. PEMBINAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEPEMUDAAN (OKP) KEPEMUDAAN DI JAWA BARAT PERLU KESERIUSAN PIHAK TERKAIT, HARUS MEMBERIKAN MANFAAT KEPADA MASYARAKAT.
 - b. MEMPERHATIKAN PENINGKATAN NILAI INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA (IPP) DENGAN MENKOORDINASIKAN PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PROGRAM-PROGRAM DI DINAS TERKAIT (DINAS PENDIDIKAN, DINAS KESEHATAN, DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA, DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL SERTA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA, DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA SERTA BIRO PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN SOSIAL)

MEMPERHATIKAN SEJUMLAH REKOMENDASI DPRD YANG TELAH DIRINCI DI ATAS, BERIKUT KAMI SAMPAIKAN RESUME DARI TIAP BIDANG :

BIDANG PEMERINTAHAN.

BERDASARKAN INDEKS PENCAPAIAN KINERJA DARI MITRA KERJA YANG BERKAITAN DENGAN BIDANG PEMERINTAHAN, ADA PERMASALAHAN MENDASAR DALAM PENGELOLAAN ASET DAERAH. SERAPAN ANGGARANNYA CUKUP BAIK. KEMUDIAN INDEKS KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MENCAPI KINERJA 82,50% ARTINYA CUKUP BAIK. KUALIFIKASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK JUGA CUKUP BAIK HANYA SAJA ADA SERAPAN ANGGARAN DIBAWAH 70% YAITU DI SEKRETARIAT DPRD. HAL TERSEBUT DIKARENAKAN ADANYA MASA TRANSISI PIMPINAN DPRD PERIODE 2014 – 2019 KE 2019 – 2024 DAN MENJADI SILPA. SECARA UMUM KINERJA BIDANG PEMERINTAHAN CUKUP BAIK.

BIDANG PEREKONOMIAN.

SECARA UMUM KINERJA PEMERINTAH PRIVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019 TIDAK LEBIH BAIK DIBANDING TAHUN 2018, TERUTAMA DILIHAT DARI KUANTITAS REALISASI ANGGARAN YANG TOTAL HANYA 3% DARI APBD TAHUN 2019. SELAIN ITU PROGRAM PRIORITAS SEPERTI PEMBANGUNAN DESTINASI WISATA, PROGRAM ONE PESANTREN ONE PRODUCT, PETANI JUARA, NELAYAN JUARA, UMKM JUARA, PASAR JUARA, DAN LOGISTIK JUARA, MASIH BELUM MENUNJUKKAN HASIL SIGNIFIKAN TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT JAWA BARAT YANG BAHKAN SECARA LAJU PEREKONOMIAN JUSTRU MELAMBAT PERTUMBUHANNYA DIBANDING TAHUN 2018.

BIDANG KEUANGAN.

VISI JABAR JUARA PADA TAHUN 2019 BISA DIKATAKAN MASIH JAUH PANGGANG DARI API. INI ADALAH CERMINAN LEMAHNYA KINERJA DAN PELAMBATAN PERTUMBUHAN PAD, YANG TIDAK SESUAI DENGAN TARGET YANG DITETAPKAN. BAHKAN HAL YANG LEBIH FATAL, TERDAPAT PERBEDAAN DATA REALISASI APBD TAHUN 2019 PADA LAPORAN BAPENDA DENGAN DATA YANG DIRILIS BANK INDONESIA. MEMPERHATIKAN CATATAN DI ATAS KAMI MEMINTA KEPADA SDR. GUBERNUR MELAKUKAN EVALUASI KEPADA PERANGKAT DAERAH TERKAIT AGAR TAK TERJADI LAGI KINERJA BURUK TERSEBUT.

BIDANG PEMBANGUNAN.

PADA TAHUN 2019 KAMI MENCATAT REALISASI ANGGARAN DAN KEGIATAN YANG SANGAT RENDAH YANG MENYEBABKAN TINGGINYA SILPA. INI MENUNJUKKAN PERENCANAAN YANG KURANG BAIK. SEBAGAI CONTOH, LIMA PROGRAM STRATEGIS GUBERNUR YAITU PEMBANGUNAN SITU, SUNGAI DAN WADUK, CREATIVE CENTRE, REVITALISASI ALUN-ALUN SERTA RUTILAHU TIDAK BERJALAN DENGAN BAIK. PERMASALAHAN LAINNYA ADALAH BELUM SELESAINYA TPPAS NAMBO DAN LEGOK NANGKA. MEMPERHATIKAN CATATAN DI ATAS KAMI MEMINTA SDR. GUBERNUR MELAKUKAN EVALUASI KEPADA PERANGKAT DAERAH TERKAIT, KHUSUSNYA MITRA KOMISI IV.

BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT.

SECARA UMUM KINERJA PERANGKAT DAERAH SEKTOR INI BISA DIKATAKAN KURANG MEMUASKAN, DIANTARANYA MENYISAKAN BEBERAPA PEKERJAAN RUMAH BERUPA PERBAIKAN LAYANAN WAJIB DI BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN SERTA PERBAIKAN MITIGASI DAN LANGKAH-LANGKAH PENANGANAN BENCANA. SECARA KUALITATIF MEMANG TERLIHAT SEOLAH BAIK, MISALNYA RATA-RATA LAMA PENDIDIKAN 8,37 DI ATAS JAWA TENGAH DAN JAWA TIMUR. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA TURUN 0,18%. NAMUN MENURUT SENSUS BPS TAHUN 2019, SUMBANGAN LULUSAN SMK YANG MENJADI KEWENANGAN LANGSUNG PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

MASIH MENYUMBANGKAN ANGKA TERTINGGI YAKNI 14,5% TAHUN 2019 PROGRAM-PROGRAM UNGGULAN GUBERNUR MASIH BELUM MENYENTUH PERMASALAHAN INTI DI SEKTOR KESEJAHTERAAN RAKYAT, HAL DI ATAS MENIMBULKAN KONSEKUENSI KERJA KERAS PERANGKAT DAERAH TERKAIT PADA TAHUN BERIKUTNYA.

MENCERMATI DAN MENIMBANG SELURUH CATATAN STRATEGIS DAN REKOMENDASI DI ATAS, MAKA PANITIA KHUSUS III MEMBERIKAN PENILAIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT PADA TINGKAT YANG BELUM MEMUASKAN, DALAM ARTIAN BELUM MENCAPAI TARGET KINERJA YANG TELAH DITETAPKAN, DAN MENGALAMI PERLAMBATAN DALAM ASPEK FISKAL DAERAH.

KAMI JUGA MEMINTA SDR GUBERNUR MEMBENTUK TIM KHUSUS GUNA MENINDAKLANJUTI SELURUH REKOMENDASI DPRD PROVINSI JAWA BARAT.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
Ketua,

ttd

TAUFIK HIDAYAT

PENYERAHAN REKOMENDASI ATAS LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR JAWA BARAT
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
DARI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
KEPADA
GUBERNUR JAWA BARAT

Nomor : 121.04/2713-SETWAN.PRSD & PUU/2020/BAPP

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh (20-05-2020), bertempat di Ruang Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : TAUFIK HIDAYAT
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat
Alamat Kantor : Jl. Diponegoro No. 27 Bandung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : MOCHAMAD RIDWAN KAMIL
Jabatan : Gubernur Jawa Barat
Alamat Kantor : Jl. Diponegoro No. 22 Bandung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, PIHAK KESATU menyerahkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Rekomendasi Atas laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2019 kepada PIHAK KEDUA.

Rekomendasi berupa catatan-catatan strategis yang berisikan saran, masukan dan/atau koreksi terhadap penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, dan penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, dan/atau kebijakan strategis Gubernur.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 20 Mei 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
Ketua,

GUBERNUR JAWA BARAT

TAUFIK HIDAYAT

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

